ANALISIS RENCANA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DAN PENAMBANGAN DI DESA WADAS TERHADAP TEORI KONFLIK KARL MARX

Fina Nayla Farha, Restu Tria Anugrah, Syahwa Putri Restivalia,
Zaematul Mahbubah, Salma Putri Adani, Didi Pramono

Universitas Negeri Semarang
Jl. Sekaran Gunungpati Semarang 50229, Jawa Tengah, Indonesia
e-mail: finanayla829@gmail.com, restutriaanugrah@gmail.com, syahwaputri2002@gmail.com
zaematull@gmail.com, salmaputriadani25@gmail.com

Abstract: The majority of people in Wadas Village work as farmers. They use natural products to support their daily lives. Over time, their welfare was disturbed by the planned construction of the Bener Dam, which exploited andesite stones from Wadas Village. This condition triggered a conflict between the local community and the government and police. This research reviews the development plan and the relevance of the problems that occurred with Karl Marx's theory of conflict. The research method used in analyzing the discussion is a qualitative descriptive method with a literature study approach. The results of the discussion regarding two main things, namely: (1) An overview of the Bener Dam construction plan and andesite stone mining in Wadas Village; (2) The relevance of the problems that occur with Karl Marx's theory of conflict. The construction of the Bener Dam raises pros and cons between the community and the government, and has the opportunity to create social classes that can be studied through Karl Marx's conflict theory.

Keywords: Wadas Village, Development, Conflict Theory

Pendahuluan

Bagi masyarakat Indonesia, profesi sebagai petani bukanlah suatu hal yang asing lagi. Berkat adanya aktivitas-aktivitas yang begitu besar pada lahan pertanian, membuat Indonesia dikenal pula sebagai negara agraris (Suratha, 2013). Peran petani sebagai salah satu aktor dalam mempertahankan pangan negara, seringkali kurang diketahui dan disadari oleh masyarakat Indonesia sendiri. Beberapa hal dipahami mengenai petani ialah pekerjaannya yang hanya bergumul pada sawah dan padi saja, padahal jika ditelisik lebih jauh lagi terdapat komoditas-komoditas unggulan yang dikembangkan oleh para petani. Komoditas-komoditas tersebut dapat berupa cengkeh, kapulaga, kemukus, durian, cabai, kelapa, sengon, pisang, aren, petai, vanili, karet, jati, keling, akasia, mahoni dan masih banyak lagi. Penghasilan yang didapatkan dari hasil pertanian pun cukup besar, apalagi jika proses pemasaran yang dilakukan telah melebar ke mana-mana. Salah satu keuntungan menjadi petani yaitu ketiadaannya ikatan waktu seperti halnya di dalam perusahaan, sehingga para petani memiliki keleluasaan dalam mengelola produk taninya.

Adapun dalam perkembangannya kini, kerap kali terjadi kisruh antara petani dengan pihak-pihak yang merencanakan pembangunan yang berada di wilayah pertanian. Pembangunan yang digadang-gadang akan mensejahterakan masyarakat sekitar tidak jarang harus menggerus lahan yang dimiliki oleh petani. Hal itu tentunya akan menyusutkan hasil yang diperolehnya melalui penggarapan lahan. Sama halnya dengan fenomena yang menimpa Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, di mana lahan pertanian yang menjadi kepemilikan masyarakat sekitar harus terancam dengan hadirnya area pertambangan di dekat mereka. Proyek pertambangan yang akan dilakukan dikatakan akan memberikan sebuah keuntungan bagi masyarakat, sehingga pada mulanya membuat warga setuju akan hal itu. Pertambangan hanyalah langkah awal, sedangkan rencana selanjutnya ialah dibangunnya sebuah Bendungan Bener di Desa Guntur, Kecamatan bener, yang berjarak 10 km dari Desa Wadas.

Dibangunnya bendungan tersebut bertujuan untuk mengairi persawahan yang malang melintang di berbagai desa dan juga sebagai pembangkit listrik. Pemerintah menganggap bahwa pembangunan bendungan termasuk ke dalam

proyek strategis nasional, karena akan menguntungkan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai ragu dan juga goyah, karena pembangunan tersebut mengharuskan terjadinya penambangan pada Desa Wadas, di mana batu andesit sangat dibutuhkan sebagai bahan material. Berbagai penolakan dari kelompok massa mulai digerakkan, masyarakat tidak ingin dari penambangan tersebut membuat pasokan air bersih dan sumber air berkurang. Selain itu, penambangan menyebabkan longsor pada desa mereka dan masyarakat mengajukan gugatan untuk membatalkan penambangan kepada PTUN kota Semarang.

Ada satu hal yang patut ditelaah dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Berbagai proyek yang sibuk digembor-gemborkan memiliki sebuah harapan untuk mampu pemeratakan pembangunan di setiap penjuru Indonesia dan juga meningkatkan perekonomian. Pembangunan Bendungan Bener diproyeksikan akan mampu mengaliri air sebesar 1.500 liter/detik. 300 liter/detik ke daerah Kebumen, 500 liter/detik ke daerah Purworejo, dan 700 liter/detik ke daerah Kulon Progo. Namun di balik itu semua, Desa Wadas yang menjadi sumber pertambangan bagi material utama bendungan justru tidak dapat mencicipi bendungan tersebut, karena sekitar 75% air disuplai untuk kepentingan Yogyakarta International Airport. Belum lagi jika aktivitas pertambangan telah selesai dilakukan, maka yang tersisa hanya kerusakan pada wilayah tersebut di mana lahan-lahan yang biasanya dijadikan sebagai tempat pertanian bagi masyarakat. Hilangnya tingkat kesuburan tentunya akan membuat kegiatan pertanian tidak bisa lagi berjalan. Bukan hanya itu saja, para petani akan kehilangan mata pencahariannya, yang pada akhirnya mau tidak mau menimbulkan fenomena bahwa masyarakat setempat akan menjadi kelas proletar yang bekerja pada kalangan borjuis.

Karl Marx mengatakan bahwa kaum borjuis sebagai pemilik modal dalam usaha yang didirikan dengan memperkerjakan buruh-buruh yang tergolong ke dalam kelas proletar (Erni et al., 2020). Diantara eduanya terdapat pengeksploitasian yang dilakukan oleh kaum borjuis, seperti pembagian jam kerja dan juga upah yang didapatkan tidak sesuai. Berbagai pembangunan yang direncanakan sudah seharusnya mengutamakan manusia dalam berbagai aspek, agar dari hasil pembangunan itu masyarakat dapat merasakan kebermanfaatannya yang bukan hanya dirasakan oleh beberapa pihak saja. Manusia harus diposisikan sebagai sesuatu yang menerima

manfaat, bukan sekadar kelompok sasaran (Uphoff, 1988 dalam Sadono, 2008). Sehingga dalam rancangan pembangunan harus disusun secara terbuka “untuk siapakah” pembangunan tersebut dengan runtutan bagaimana mekanisme pelaksanaannya, agar masyarakat pun paham. Selanjutnya apakah pembangunan bendungan di Desa Guntur benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar? Dan bagaimanakah relevansi permasalahan pembangunan dan juga pertambangan itu jika dikaitkan dengan teori konflik dari Karl Marx? Dengan demikian, hal yang ingin dicapai dalam pembahasan ini ialah untuk mengetahui ulasan rencana pembangunan serta relevansi permasalahan yang terjadi dengan teori konflik dari Karl Marx.

Metodologi

Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif. Data umumnya berupa deskripsi hasil observasi dan wawancara. Subyek penelitiannya yaitu di planning pembangunan bendungan dan penambangan pada desa Wadas yang diambil asal sumber data berupa video. Berikut sumber data penelitian ini yaitu pada video yang berjudul “Wadas Waras” pada channel youtube Watchdoc Documentary. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu aktivitas yang diamati oleh peneliti. Sehingga mendapatkan data yang diinginkan sesuai yang sudah di planning dari awal. Jika peneliti tidak melakukan observasi secara langsung maka data yang dihasilkan tidak pasti

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penelitian yaitu mengobservasi video di youtube. Mengamati video rencana pembangunan bendungan serta penambangan di desa Wadas. Sedangkan teknik mencatat yaitu dipergunakan untuk memperkuat daya ingat peneliti. Langkah-langkah yang dipergunakan dalam mendapatkan data video “Wadas Waras” menjadi berikut:

1. Penulis menentukan judul video yang akan diobservasi
2. Kemudian mengamati video dan mencatat point-point penting dalam video
3. Peneliti menulis laporan hari pengamatan video melalui catatan

Adapun tentang instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif menjadi human instrument, berfungsi buat menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan

data, dan menyimpulkan data. Penelitian juga memakai instrumen lain buat membantu pada pengumpulan data dan analisis data. Di data berupa dokumen video memakai indera laptop atau handphone untuk melihat data video. Data berupa dokumen tertulis menggunakan alat tulis. Pengembangan yang dilakukan pada penelitian yaitu menggunakan pendekatan study literatur melalui aneka macam asal yang relevan, baik berasal dari jurnal ataupun artikel.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Rencana Pembangunan Bendungan Bener

Menurut Keputusan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013, serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/20 Tahun 2018 yang berisi mengenai perizinan rencana pembangunan Bendungan Bener, Bendungan Bener termasuk kedalam program pembangunan berskala nasional. Program pembangunan berskala nasional ialah sebuah rancangan program pembangunan yang difokuskan untuk meningkatkan ekonomi serta pemeratakan pembangunan di wilayah Indonesia. Luas kawasan Bendungan Bener selebar 500 hektar atau setara dengan 4.300 bidang. Kawasan Bendungan bener berada diatas dua wilayah, yakni 3.096 termasuk kedalam wilayah Purworejo dan sisanya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Wonosobo.

Terdapat 7 desa di wilayah kabupaten Purworejo tepatnya ada di wilayah Kecamatan Bener yang nantinya akan terdampak langsung dari adanya pembangunan Bendungan Bener. Wilayah-wilayah desa tersebut antara lain: Wadas, Bener, Kedung Loteng, Laris, Guntur, Karang Sari, dan Kemiri. Kawasan Bendungan Bener akan dialokasikan sebagai destinasi wisata, perikanan, dan konservasi. Sedangkan air dalam bendungan tersebut akan digunakan untuk irigasi 15.500 hektar sawah, suplai air baku kebutuhan sehari-hari masyarakat Kabupaten Purworejo, Kebumen, dan Kulon Progo, serta pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 6 megawatt. Bendungan Bener diproyeksikan menghasilkan air sebesar 1.500 liter/detik. 300 liter/detik mengalir ke daerah Kebumen, 500 liter/detik mengalir ke daerah Purworejo, dan 700 liter/detik mengalir ke daerah Kulon Progo. Untuk pembangunan Bendungan Bener pemerintah telah menyiapkan dana sebanyak 3,8 triliun sejak tahun 2017.

Seperti halnya program pembangunan berskala nasional yang lain, guna memperlancar proses pembangunan, Bendungan Bener membutuhkan tanah, bahan material, dan sumber daya manusia. Bendungan Bener membutuhkan tanah kurang lebih seluas 462,22 hektar (4.622.170,50 m²) yang terdiri dari 3.483 bidang tanah (Akmal, 2014). Agar dapat memenuhi keperluan akan tanah tersebut, maka negara harus mengambil alih tanah masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan Bendungan Bener dengan cara membelinya (Tauchid 2009, 355). Proses pengalihan tanah yang dilakukan pemerintah dengan cara membelinya dari masyarakat dapat disebut dengan sistem penggandaan tanah. Sistem penggandaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener tersebut telah diatur didalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2017 yang didalamnya membahas tentang rencana pengelolaan tata ruang wilayah kabupaten Purworejo tahun 2011-2031 (Wardani, 2019).

Program pembangunan Bendungan Bener juga telah dinyatakan lolos dalam uji geologi, uji analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan uji land question and resettlement action plan (LARAP). Pada saat ini program pembangunan Bendungan Bener telah sampai pada tahap pengerjaan. Pihak kantor pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai tim pelaksana secara bertahap telah melakukan pengukuran tanah. Selain itu penilaian tanah pada tahap pertama dan kedua juga telah dilakukan oleh tim penilai tanah. Akan tetapi guna mempercepat pengerjaan program, dalam memulai pembangunan bendungan maka diadakan pengerukan tanah terlebih dahulu.

Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas

Desa Wadas akan dijadikan sebagai area pertambangan. Awal kegiatan pertambangan tersebut dimulai dengan adanya kegiatan pengeboran di daerah Desa Wadas. Pertambangan batu yang dilakukan di Desa Wadas ternyata digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener yang terletak di Desa Guntur, Kecamatan Bener, jaraknya kurang lebih sekitar 10 km dari Desa Wadas. Dengan dimensi tinggi sebesar 159 meter dan panjang timbunan sebesar 543 meter, Bendungan Bener membutuhkan material yang sangat banyak. Material berupa batuan andesit itulah yang akan ditambang dari Desa Wadas untuk bahan urugan Bendungan

Bener. Menurut BBWSOS (Balai Besar Wilayah Sungai Opak Serayu) sebagai pemrakarsa pembangunan Bendungan Bener, material yang akan diambil dari Desa Wadas sebesar 8,5 juta meter kubik. Dari areal 400 hektar Desa Wadas, BBWSOS akan membebaskan 114 hektar yang meliputi 7 dusun. Dari 300 warga di 7 dusun, mayoritas warga menolak adanya pertambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener.

Masyarakat Desa Wadas memiliki alasan kuat mengapa mereka menolak adanya penambangan batu andesit di daerah mereka, salah satu alasannya yaitu terkait sumber air minum. Sebab di sekitar area pertambangan tersebut terdapat banyak sumber mata air yakni sekitar 27 sumber mata air yang digunakan untuk air minum. Selain itu, kekhawatiran lain yaitu daerah mereka akan terjadi longsor seperti musibah yang terjadi tahun 1988. Karena itu, Desa Wadas kemudian ditetapkan sebagai daerah rawan bencana. Apabila sebuah tempat sudah dilakukan penambangan, maka tempat tersebut akan kehilangan kesuburannya dan sudah tidak bisa dikembangkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu, dampak lain yang nantinya akan didapatkan oleh masyarakat Wadas apabila pertambangan tersebut jadi dilakukan adalah masyarakat dapat kehilangan mata pencahariannya.

Relevansi Permasalahan dengan Teori Konflik dari Karl Marx

Karl Marx mengemukakan pendapatnya mengenai modal, kaum kapitalis, dan juga kaum proletariat. Kasus ini bersinggungan dengan teori konflik hasil pemikiran Karl Marx. Dikatakan bahwa teori konflik lahir dari beberapa konsep, yang pertama yaitu mengenai kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan yang terakhir berkaitan dengan negara. Pemikiran Karl Marx mengenai teori konflik ini saling berhubungan satu sama lain dengan konsep teori dan kejadian di lapangan. Hal ini jugalah yang terjadi pada masyarakat Desa Wadas, sebagai salah satu desa yang memiliki sumber pencaharian utama sebagai petani pastinya akan terdapat suatu konflik tersendiri. Baik itu konflik yang berasal dari alam maupun konflik yang terjadi dikarenakan suatu perubahan yang direncanakan.

Posisi warga Desa Wadas yaitu ada yang sebagai kaum borjouis yaitu warga

yang memiliki modal tersendiri, modal disini bisa diartikan sebagai lahan pertanian yang mereka miliki secara pribadi, ada juga warga yang menjadi kaum proletar, atau warga yang menjajakan tenaga kerjanya dan juga tidak memiliki alat untuk produksi ataupun lahan pertanian sendiri. Yang memberikan upah kepada kaum proletar yaitu kaum borjouis atau kaum kapitalis pemilik modal. Pada penjelasan ini saja sebetulnya terdapat konflik-konflik yang terjadi secara internal antar pemilik lahan dan juga pekerjanya, contohnya yaitu seperti pembagian jam kerja dan juga upah yang didapatkan tidak sesuai. Terlebih konflik dengan pemerintah yang menginginkan pembangunan pada Desa Wadas ini, tentunya akan menimbulkan konflik.

Konflik ini terjadi karena perbedaan kelas sosial, yang mana para pemilik lahan dan juga petani ini harus bersaing dengan kaum penguasa yaitu pemerintah yang menginginkan pembangunan berupa area pertambangan di Desa Wadas ini. Pada awalnya masyarakat mendukung atas pembangunan yang dilakukan pemerintah ini, dikarenakan mereka mendapat informasi atas manfaat yang nantinya akan mereka dapatkan. Konflik muncul mulai dari pemerintah sekitar yaitu kepala desa yang tidak menyampaikan informasi secara jelas. Setelah melihat dan mendengar mengenai pertambangan ini, muncul penolakan dari warga Desa Wadas. Hal ini dikarenakan material berupa batuan adesit itulah yang akan ditambang dari Desa Wadas untuk bahan urugan Bendungan Bener. Karena ini juga memunculkan kelompok masyarakat Desa Wadas untuk menolak penambangan pada daerah ini.

Kejadian ini juga menjadi bagian dari teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, masyarakat dapat menjadi kelas proletar yang menjual tenaganya serta ada kalangan borjouis pemilik modal yang mengeksploitasi tenaga masyarakat untuk bekerja di bidang usahanya. Dasar penambangan di Desa Wadas berasal dari Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tanggal 8 Juni 2018. Berbekal IPL itu, tanggal 23 April 2021 dilakukan sosialisasi dan pematokan lahan di Desa Wadas. Pada saat itu polisi datang dengan perlengkapan sangat lengkap, sedangkan pada saat itu masyarakat hanya sedang menghentikan dengan menghalangi jalan dan bermujahadah. Di saat kericuhan mulai terjadi, polisi menembakkan gas

air mata dengan berbagai kekerasan lainnya.

Untuk membatalkan penambangan, masyarakat Desa Wadas sudah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kota Semarang. Tuntutannya agar IPL yang dibuat Gubernur Jawa Tengah dibatalkan. Tanggal 5 Juni 2021, Gubernur Jawa Tengah sudah mengeluarkan rancangan IPL lama yang sudah habis. Pakar hukum lingkungan Universitas Gajah Mada, I Gusti Wardana menjadi saksi ahli. Ia menyebut izin penambangan Desa Wadas bermasalah. Tanggal 2 September 2021, PTUN Semarang menolak gugatan masyarakat Wadas. Masyarakat Wadas selanjutnya mengajukan kasasi. Padahal harapan dari masyarakat yang paling utama yaitu Desa Wadas tetap lestari, agar masyarakat kedepannya masih tetap bisa melanjutkan aktivitasnya.

Kesimpulan

Simpulan dari penelitian ini yaitu terjadi suatu konflik pada warga Desa Wadas yang adanya rencana pembangunan Bendungan Bener yang mengeksploitasi batu andesit dari Desa Wadas. Kondisi itulah memicu timbulnya konflik antara masyarakat sekitar dengan pemerintah dan aparat kepolisian. Sebagai masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani. Hal ini tentu saja menimbulkan konflik, dikarenakan keuntungan menjadi petani yaitu mereka tidak diikat oleh waktu seperti di perusahaan. Pembangunan Bendungan Bener menimbulkan pro dan juga kontra antara masyarakat dan pemerintah, serta berpeluang memunculkan kelas-kelas sosial yang dikaji melalui teori Karl Marx. Masyarakat Desa Wadas merasa cukup atas hasil yang mereka peroleh dari alam, sebab dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Permasalahan ini juga relevan dengan teori konflik hasil pemikiran yang dikemukakan Karl Marx, dimana warga sebagai kaum borjouis yaitu warga yang memiliki modal tersendiri, modal disini bisa diartikan sebagai lahan pertanian yang mereka miliki secara pribadi, ada juga warga yang menjadi kaum proletar, atau warga yang menjajakan tenaga kerjanya dan juga tidak memiliki alat untuk produksi ataupun lahan pertanian sendiri. Yang memberikan upah kepada kaum proletar yaitu kaum borjouis atau kaum kapitalis memiliki modal. Dan juga terdapat konflik berdasarkan kelas sosial yaitu konflik yang terjadi antara pemerintah dan juga warga Desa Wadas.

Saran yang dapat diberikan yaitu jalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan juga pekerja penambangan dengan warga sekitar, lakukan diskusi dengan menampilkan keuntungan yang dapat diperoleh dari masing-masing pihak, karena warga Desa Wadas tentunya tidak akan membiarkan desa nya dijadikan area penambangan begitu saja tanpa adanya keuntungan yang mereka peroleh.

Pustaka Acuan

- Adriansa, M. Z., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas). *Diponegoro Law Journal*, 9(1), 138-154.
- Erni, F., Muhlis, S. N., Mansyur, S., Sri, L., Putri, W., Badriah, S., Khadija, N., Wulandari, S., Asiah, N., Asri, M. F., Amalia, F., Nurhalisa, S., Astuty, W., Haerul, Z. A., Imran, A., Mutmainnah, N., Hikma, F., Sanapati, A. R., & Budaya, R. (2020). *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi Klasik Sampai Postmodern*. (W. Bakri (ed.)). IAIN Parepare Nusantara Press.
- Laksono, Dhandy. Dkk. (2021). *Film Dokumenter Watchdoc Documentary*. <https://www.youtube.com/watch?v=7ymbC-W-tk&t=674s>.
- Ritzer, G. 2012. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadono, D. (2008). Pemberdayaan Petani : Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Penyuluhan*, 4(1), 66-74.
- Setiadi, Elly M., Kolip, Usman. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP

Suratha, I. K. (2013). Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Geografi*, 16(1), 67-80.